

ABSTRAK

Diskresi kepolisian telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepolisian. Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Pelaksanaan diskresi kepolisian diperlukan apabila polisi menganggap penting untuk dilakukan, sebagai contoh apabila di dalam berlalu lintas di jalan raya polisi lalu lintas mencermati terjadi kemacetan yang luar biasa, lalu polisi dapat mengambil tindakan dengan memberi jalan bagi kendaraan bermotor meskipun posisi lampu masih posisi merah dan menstop kembali pada posisi merah berikutnya, dengan demikian kondisi kemacetan dapat teratasi.

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian pada saat ini. 2) Untuk mengkaji dan menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. 3) Untuk mengkaji dan menganalisa rekonstruksi kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia yang berbasis keadilan dan kemanfaatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitiannya adalah: 1) Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan tugas baik berupa Perkap, SOP (Standar Operational Prosedur), Juklak, Juknis sehingga dalam pengambilan keputusan untuk penerapan Diskresi ini agar benar-benar diberikan pembatasan-pembatasan yang betul-betul mengikat sehingga penyimpangan hukum dalam penerapan Diskresi ini bisa diminimalisir terjadinya suatu penyimpangan hukum. 2) Tindakan yang diambil Polisi untuk melaksanakan kewenangan diskresi memang mengandung sejumlah pertanyaan mengenai nilai-nilai dan prinsip yang harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Polisi pada saat kewenangan tersebut dijalankan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. 3) Rekonstruksi kewenangan diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian di Indonesia berdasarkan keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi Kewenangan Diskresi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian

ABSTRACT

Police discretion has become the authority and responsibility of the police. In the Police Law Number 2 of 2002 Article 18 has been stated in one article about one form of legal authority in the form of police discretion, where the police have the authority to take other responsible actions. The implementation of police discretion is necessary if the police consider it important to do it, for example if in the traffic on the highway the traffic police observe extraordinary congestion, then the police can take action by giving way for motorized vehicles even though the lamp position is still red and stops again in the next red position, thus congestion conditions can be overcome.

From the description of the background and subject matter of the problem, the objectives of this research are: 1) To examine and analyze discretionary authority and legal accountability in the implementation of police duties and functions at this time. 2) To examine and analyze what factors influence discretionary authority and criminal accountability in carrying out the duties and functions of the police. 3) To review and analyze the reconstruction of discretionary authority and criminal accountability in the implementation of the duties and functions of the police in Indonesia based on justice and expediency.

The approach method used in this study uses sociological juridical methods, because in this study, the law is conceptualized as an empirical phenomenon observed in real life.

Based on the description in the previous chapters, the results of the research are: 1) In carrying out the police duties there are many regulations relating to the implementation of good duties in the form of Perkap, SOP (Standart Operating Procedure), Operational Guidelines, Technical Guidance so that in decision making for the application of this discretion so that really given the restrictions that really tie so that legal irregularities in the application of this discretion can be minimized the occurrence of a legal deviation. 2) The actions taken by the police to exercise discretionary authority do contain a number of questions regarding the values and principles that must always be considered and considered by the Police when the authority is exercised, because this will greatly affect the professionalism of the police in carrying out its duties. 3) Reconstruction of discretionary and legal responsibility in the implementation of the duties and functions of the Police in Indonesia based on justice and usefulness in the implementation aims to realize justice, benefit and legal certainty. The legal reconstruction is to reconstruct Law Number 2 of 2002 Article 18 paragraphs 1 and 2.

Keywords: Reconstruction of Discretionary Authority, Implementation of Police Duties and Functions